

## MEWUJUDKAN PENGURANGAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**Doni Wahyu Prabowo**

Program Studi Magister Pendidikan Sains FKIP UNS Surakarta  
Jl. Ir. Sutami 36A, Surakarta, Indonesia  
E-mail : doni.prabowo@student.uns.ac.id

**Abstrak:** Ketimpangan adalah suatu keadaan yang tidak setara, terutama dalam status, hak, dan kesempatan. Ketimpangan ini menjadi salah satu tujuan berkelanjutan (*SDGs*) yaitu tujuan nomor 10. Koefisien gini merupakan ukuran ketimpangan yang berkisar dari nol, di mana setiap orang memiliki hal yang sama, hingga 1, di mana semua hanya untuk satu orang. Pada Maret 2022, nilai koefisien gini Indonesia adalah 0,384 di mana provinsi dengan Rasio Gini tertinggi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yakni 0,439. Dari analisis literatur, kecenderungan kondisi ketimpangan di Provinsi DIY ditunjukkan oleh tingkat kemiskinan yang rendah di perkotaan dan tingkat kemiskinan yang tinggi di pedesaan. Kebijakan pemerintah Provinsi DIY untuk mengurangi ketimpangan ekonomi ini secara garis besar menasar pada upaya pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan upaya mengatasi beban pengeluaran masyarakat. Kebijakan ini tertuang pada visi Pemerintah Provinsi DIY tahun 2017-2022 “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia” yang dijabarkan menjadi misi “Panca Mulia” dan tujuh arah kebijakan lengkap dengan target yang ingin dicapai. Pemerintah DIY perlu segera menyusun RJMPD 2022-2027 dengan evaluasi target pencapaian pada RJMPD 2017-2022 menjadi dasar desain kebijakan untuk mendorong eksekusi kebijakan yang berorientasi pada pemerataan kesenjangan di Provinsi DIY.

**Kata kunci :** *Ketimpangan, Koefisien Gini, Kebijakan.*

### PENDAHULUAN

*Inequality* atau ketimpangan adalah suatu keadaan yang tidak setara (equal), terutama dalam status, hak, dan kesempatan (Hornby, 2015). Joseph Stiglitz (2016) dalam tulisannya ‘*Inequality and Economic Growth*’, menyatakan bahwa secara tradisional selama ini tidak ada konsensus tentang apa yang disebut ketimpangan serta apa yang menyebabkannya.

Pemahaman tentang ketimpangan telah berevolusi dari pandangan berorientasi hasil tradisional, di mana pendapatan digunakan sebagai proxy untuk kesejahteraan. Berorientasi pada peluang perspektif mengakui bahwa keadaan kelahiran adalah penting untuk hasil kehidupan dan kesetaraan kesempatan itu membutuhkan titik awal yang adil untuk semua (UN, 2015).

Organisation for Economic Co-operation and Development (2014) mengungkapkan bahwa kesenjangan antara kaya dan miskin berada pada tingkat tertinggi di sebagian besar negara OECD dalam 30 tahun. Saat ini, 10% populasi terkaya di wilayah OECD berpenghasilan 9,5 kali lebih banyak daripada

10% termiskin. Sebaliknya, pada 1980-an rasionya mencapai 7:1.

Peningkatan ketimpangan pendapatan terbukti tidak hanya dalam kesenjangan yang semakin lebar antara desil pendapatan atas dan bawah, tetapi juga dalam koefisien gini, ukuran ketimpangan yang lebih luas (yang berkisar dari nol, di mana setiap orang memiliki pendapatan yang sama, hingga 1, di mana semua pendapatan hanya untuk satu orang). Di negara-negara OECD pada 1980, nilai koefisien gini 0,29; pada 2012, telah meningkat 3 poin menjadi 0,32 (OECD, 2014).

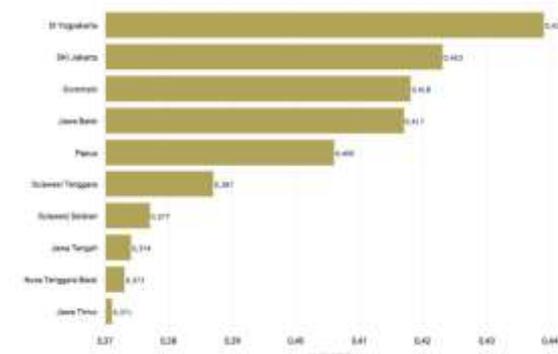
Menurut Yusuf dkk (2013), ketimpangan di Indonesia telah mengalami peningkatan hingga mencapai titik tertinggi dari yang pernah dilaporkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik). Kondisi tersebut menjadikan ketimpangan ekonomi menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam menyusun kebijakan publik. Berdasarkan data statistik Indonesia, persentase penduduk miskin di Indonesia telah menurun dari 23,43% menjadi 9,54% dari tahun 1999 hingga Maret 2022 (BPS, 2022). Kondisi tersebut tidak semata-mata menurunkan tingkat ketimpangan yang ada di Indonesia.

Berdasarkan data statistik Indonesia, tingkat ketimpangan ekonomi di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 0.31 menjadi 0.384 dari tahun 1999 hingga Maret 2012 (BPS, 2022).



Gambar 1. Rasio gini Indonesia 2020-2022

Menurut BPS (2022), Pada Maret 2022 ada 6 provinsi dengan nilai Rasio Gini di atas rata-rata nasional. Provinsi dengan Rasio Gini tertinggi adalah DI Yogyakarta, yakni 0,439. Di urutan selanjutnya ada DKI Jakarta dengan Rasio Gini 0,423, diikuti Gorontalo 0,418, Jawa Barat 0,417, Papua 0,406, dan Sulawesi Tenggara 0,387. Sementara itu 28 provinsi lainnya memiliki Rasio Gini di bawah rata-rata nasional. Posisi terendah ditempati Kepulauan Bangka Belitung dengan Rasio Gini 0,236 pada periode sama.



Gambar 2. 10 Provinsi dengan Rasio Gini Tertinggi (Maret 2022)

Tingginya rasio gini menunjukkan tingginya ketimpangan yang terjadi di Provinsi DIY. Bahkan nilai rasio gininya berada jauh di atas angka rasio gini nasional. Padahal, DIY merupakan sebuah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka NKRI. (UU No. 13 Tahun 2012). Selain itu, Provinsi DIY juga memiliki banyak potensi, terutama di bidang pendidikan dan pariwisata. Dengan keistimewaan penyelenggaraan pemerintahan dan potensi ini, Provinsi DIY diharapkan

mampu mengatasi masalah ketimpangan yang saat ini terjadi.

## METODE

Penelitian menggunakan analisis deskriptif dari data yang diperoleh. Penelitian menyajikan hasil penelusuran mengenai kondisi ketimpangan yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Literature review* dilakukan dengan fokus pada artikel original yang memuat abstrak, pendahuluan, metode, dan hasil. Pencarian artikel dilakukan dengan kata kunci ketimpangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kriteria literatur yang digunakan yaitu jurnal yang berkaitan dengan ketimpangan, data terkait ketimpangan yang terjadi, data potensi daerah dan kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan penuntasan masalah ketimpangan yang terjadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

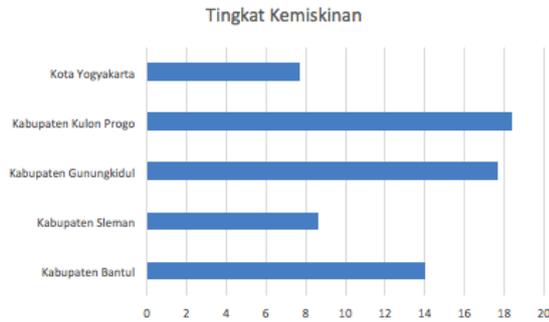
### Ketimpangan Perdesaan dan Perkotaan

Ketimpangan perdesaan dan perkotaan di DIY ditandai oleh gambaran makro yang nyata dan kontras (Angga, 2017). Kawasan perkotaan DIY didominasi oleh Kota Yogyakarta dan sebagian Kabupaten Sleman yang masuk ke dalam kawasan aglomerasi Yogyakarta. Sementara itu, kawasan perdesaan mendominasi hampir semua wilayah Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan sebagian Kabupaten Bantul. Kawasan perkotaan ditandai dengan blok area hitam pada peta di gambar 3.



Gambar 3. Peta Wilayah Provinsi DIY

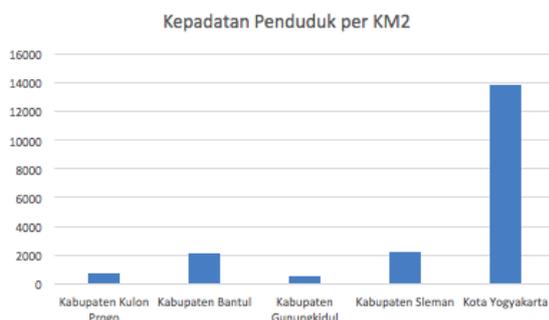
Lanskap ini berbanding lurus dengan data-data ekonomi, terutama persentase kemiskinan dan indeks ketimpangan di lima daerah ini. Pada tahun 2022, persentase kemiskinan tertinggi berada di Kulon Progo, Gunungkidul, dan disusul Bantul. Sementara Sleman dan Kota Yogyakarta memiliki persentase kemiskinan yang jauh lebih rendah.



Gambar 4. Tingkat kemiskinan DIY per daerah 2022

Data tahun 2022 ini tidak jauh berbeda dengan data di tahun-tahun sebelumnya. Dari sudut pandang regional, hal ini menunjukkan fenomena ketimpangan yang cukup parah antara perkotaan dan perdesaan di Provinsi DIY.

Adanya realitas kesenjangan regional dan distribusi spasial atas sumber daya merupakan dampak dari proses pembangunan yang tidak merata. Pembangunan sarana dan prasarana umumnya lebih diutamakan untuk daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Sehingga dapat juga dikatakan bahwa ketimpangan antardaerah erat kaitannya dengan ketimpangan penyebaran penduduk.



Gambar 5. Kepadatan Penduduk DIY per daerah 2022

### Potensi Provinsi DIY

Provinsi yang menyandang status daerah istimewa melalui UU No. 13 Tahun 2012 ini dikenal sebagai destinasi pariwisata sekaligus daerah utama penyedia pelayanan pendidikan tinggi. Terletak di Jawa bagian selatan, provinsi ini memiliki bentang alam yang hampir

lengkap: dari pegunungan vulkanik, pertanian irigasi, dataran karst geopark Sewu, dan jajaran pantai di sepanjang pesisir selatan. Dari sisi modal sumberdaya manusia (human capital), indeks pembangunan manusia (IPM) DIY menempati posisi tertinggi kedua setelah DKI Jakarta pada tahun 2016 dengan indeks sebesar 78,38. Komponen angka harapan hidup merupakan yang tertinggi di Indonesia, yakni 74,71 tahun, sementara harapan lama sekolah (HLS) juga tertinggi di Indonesia, 15,23 tahun (BPS DIY, 2017).

Struktur perekonomian DIY tahun 2016 yang diukur dari distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ditopang oleh tiga lapangan usaha yang paling besar memberikan kontribusi. Tiga sektor usaha tersebut, di antaranya: (1) industri pengolahan (13,21 persen); (2) pertanian (10,41 persen); dan (3) penyediaan akomodasi dan makan minum (10,22 persen).

Tabel 1. Distribusi Persentase PDRB DI. Yogyakarta menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku 2012-2016 (dalam persen)

No.	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015 <sup>1)</sup>	2016 <sup>1)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertanian	11,19	11,13	10,52	10,64	10,41
2	Pertambangan dan Penggalian	0,60	0,58	0,58	0,58	0,54
3	Industri Pengolahan	13,28	13,82	13,58	13,11	13,21
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,12	0,10	0,10	0,12	0,13
5	Pengadaan Air	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10
6	Konstruksi	9,52	9,49	9,40	9,38	9,34
7	Perdagangan dan Restoran, Akomodasi dan Makanan Minuman	8,30	8,17	8,27	8,22	8,48
8	Pengangkutan dan Pergudangan	5,51	5,63	5,72	5,88	5,88
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minuman	9,32	9,75	10,04	10,24	10,22
10	Informasi dan Komunikasi	9,49	9,82	9,51	9,13	9,14
11	Jasa Keuangan	3,49	3,73	3,88	3,87	3,84
12	Real Estat	7,63	8,85	7,90	7,82	7,68
13	Jasa Perusahaan	1,08	1,31	1,03	1,03	1,01
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	7,88	7,89	8,07	8,28	8,37
15	Jasa Pendidikan	8,24	8,93	8,19	8,48	8,25
16	Jasa Kesehatan	2,50	2,47	2,45	2,52	2,51
17	Jasa-jasa Lainnya	3,57	3,33	3,83	3,88	3,87
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Data PRDB selanjutnya bisa dijabarkan menjadi distribusi PRDB di kabupaten/ kota di DIY. Jika kita melihat distribusi PDRB di tiap kabupaten dan kota, maka terdapat sejumlah variasi di tiga sektor dominan (pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan) (lihat tabel 2). Data-data ini menunjukkan bahwa kecenderungan sektor pertanian belum banyak berkontribusi bagi penurunan angka kemiskinan yang tinggi di daerah yang mengandalkan sektor primer pertanian. Sementara itu, kondisi menunjukkan bahwa ketimpangan menjadi sesuatu yang tak terhindarkan jika kebijakan di sektor primer tak mampu menghasilkan nilai tambah yang sebanding dengan sektor-sektor non primer bagi tingkat pendapatan warga.

Tabel 2. Kontribusi Sektor-Sektor Dominan PDRB ADHB menurut Kabupaten/Kota di DIY 2011, 2013, 2015 (persen)

Kabupaten/Kota	Sektor Dominan	Kontribusi		
		2011	2013	2015 <sup>1)</sup>
		(%)	(%)	(%)
Kabupaten	1. Pertanian	22,64	21,17	20,62
	2. Perdagangan	12,75	13,06	12,96
	3. Industri Pengolahan	12,88	12,02	11,98
Bantul	1. Industri Pengolahan	16,44	15,44	14,86
	2. Pertanian	14,89	15,34	14,59
	3. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,89	10,87	11,70
Gunungkidul	1. Pertanian	26,21	26,43	26,58
	2. Kesehatan	9,32	9,62	9,81
	3. Adm, Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	8,43	8,10	8,38
Sleman	1. Industri Pengolahan	14,84	14,21	13,45
	2. Kesehatan	11,25	10,99	10,76
	3. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,49	9,88	10,28
Yogyakarta	1. Industri Pengolahan	13,79	14,03	13,80
	2. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,51	12,81	13,21
	3. Informasi dan Komunikasi	12,80	11,80	10,41

Data-data makro di atas nampaknya tak bisa lepas dari konteks aglomerasi perkotaan Yogyakarta (APY) yang mencakup Kota Yogyakarta, Sleman bagian selatan, dan Bantul bagian utara dengan luas mencapai 18.819 hektar. Kota Yogyakarta sebagai pusat kawasan metropolitan (Greater Yogyakarta) berfungsi sebagai pusat kawasan urban dimana pendidikan, kepadatan penduduk dan sektor bisnis terkonsentrasi.

**Upaya Pemerintah mengatasi ketimpangan**

Pemerintah daerah DIY mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan untuk mengurangi ketimpangan karena sejalan dengan tujuan daerah yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022, yaitu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Bahkan, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan wilayah menjadi prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2023. (Bappeda DIY, 2022).

Adapun target yang ditetapkan untuk mencapai tujuan mengurangi kesenjangan dalam pembangunan berkelanjutan selama tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut: (1) Koefisien Gini (2) Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan (3) Desa mandiri berbudaya (4) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) (5) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.

Arah kebijakan Provinsi DIY untuk SDGs nomor 10 adalah sebagai berikut: (1) Pemenuhan wirausaha baru yang mandiri, (2) Peningkatan kapasitas dan akses usaha bagi rumah tangga miskin, (3) Meningkatkan peluang kesempatan kerja, memperbanyak penempatan tenaga kerja, peningkatan kualitas

pekerja dan calon pekerja, pengawasan dan hubungan industrial, (4) Pemenuhan ketercukupan pangan dan gizi masyarakat, (5) Pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat miskin, (6) Peningkatan penduduk berakses air bersih layak, (7) Peningkatan penduduk berakses energi, (8) Penyediaan tempat tinggal yang layak dengan prioritas masyarakat berpenghasilan rendah, (9) Memperkuat lembaga pelestarian budaya dan pengembangan budaya di kawasan cagar budaya, saujana budaya, desa dan kelurahan budaya, (10) Upaya penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), (11) Upaya penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan tertentu untuk mengamankan pendapatan yang memadai (Bappeda DIY, 2022).

Sementara pada Arah Kebijakan Pembangunan DIY 2017-2022, Pemerintah DIY sudah memberikan beberapa arah kebijakan yaitu Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja dengan visi “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia”.



Gambar 3. Arah Kebijakan Provinsi DIY

Visi ini kemudian dijabarkan menjadi Misi Panca Mulia dan 7 Arah Pembangunan tahun 2017-2022. Arah pertama yaitu bertindak secara aktif mengisi kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia dalam Kerangka Perjanjian IORA (Indian Ocean Rim Association), untuk mengembangkan Wilayah Yogyakarta Bagian Selatan semata-mata untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja secara keseluruhan, baik yang tinggal di Wilayah Selatan maupun yang tinggal di Wilayah lain di seluruh Yogyakarta. Peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja mencakup pengertian peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan sosial dan beradab.



### Target kebijakan periode sebelumnya

Berdasarkan data Bapperda DIY (2017) dalam RJMPD 2017-2022, Pemerintah Provinsi DIY menerapkan beberapa target sebagai berikut :

1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM dengan indikator IPM 78,38 di tahun 2016 menjadi 81,68 di tahun 2022.
2. Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat dengan indikator turunnya indeks gini dari 0,4198 pada tahun 2016 menjadi 0,365 pada tahun 2022 dan prosentase angka kemiskinan dari 13,34 pada tahun 2016 menjadi 10,11 pada tahun 2022.
3. Meningkatnya Derajat Kualitas hidup sosial masyarakat dengan indikator kenaikan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dari 69,68 pada tahun 2016 menjadi 70,32 pada tahun 2022.
4. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan dengan indikator kenaikan pertumbuhan ekonomi dari 5,05 pada tahun 2016 menjadi 5,34 pada tahun 2022 dan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) dari 55,80 pada tahun 2016 menjadi 60,98 pada tahun 2022.

Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah dengan indikator Indeks Williamson dari 0,4662 pada tahun 2016 menjadi 0,4489 pada tahun 2022.

### SIMPULAN

Dari analisis literatur, kecenderungan kondisi ketimpangan di Provinsi DIY ditunjukkan oleh tingkat kemiskinan yang rendah di perkotaan dan tingkat kemiskinan yang tinggi di pedesaan. Kebijakan pemerintah Provinsi DIY untuk mengurangi ketimpangan ekonomi ini secara garis besar menasar pada upaya pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan upaya mengatasi beban pengeluaran masyarakat dengan berbagai skema jaminan sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. Kebijakan ini tertuang pada visi Pemerintah Provinsi DIY tahun 2017-2022 "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia" yang dijabarkan menjadi misi "Panca Mulia" dan tujuh arah kebijakan lengkap dengan target yang ingin dicapai.

Selain itu, riset ini juga merekomendasikan Pemerintah DIY perlu segera menyusun RJMPD 2022-2027 karena RJMPD 2017-2022 akan berakhir tahun ini. Selain itu evaluasi target pencapaian juga harus menjadi dasar desain kebijakan terkait pengurangan angka ketimpangan dan mendorong eksekusi

kebijakan yang berorientasi pada pemerataan kesenjangan di Provinsi DIY.

### DAFTAR PUSTAKA

- Angga, R. D., dkk. (2017). *Working Paper : Ketimpangan Perdesaan dan Perkotaan di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta : Institute for Research and Empowerment
- Atkinson, A. (2015). *Inequality: What Can be Done?* United State of America: Harvard University Press.
- Bappeda DIY & BPS DIY (2016a). *Analisis Informasi Statistik Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta 2016*. Yogyakarta: Bappeda & BPS DIY.
- Bappeda DIY & BPS DIY (2016b). *Laporan Akhir Analisis Kemiskinan Multidimensi dan Ketahanan Pangan di DIY*. Yogyakarta: Bappeda & BPS DIY.
- Bappeda DIY & BPS DIY (2016c). *Laporan Akhir Analisis Produk Domestik Regional Bruto Daerah Istimewa Yogyakarta 2011- 2015*. Yogyakarta: Bappeda & BPS DIY.
- Bappeda DIY (2014). *Laporan Akhir Analisis Kesejahteraan Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Bappeda DIY.
- Bappeda DIY (2016). *Laporan Akhir Penyusunan Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur terhadap Pembangunan Ekonomi DIY*. Yogyakarta : Bappeda DIY
- Bappeda DIY (2017). *Arah Kebijakan Pembangunan DIY 2017-2022*. Yogyakarta : Bappeda DIY
- Badan Pusat Statistik (2022). *Statistik Indonesia 2022*. Jakarta: BPS.
- Hornby, Albert S. (2015). *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. London: Oxford University Press.
- OECD. (2014). *Focus on Inequality and Growth*.
- Stiglitz, J., Sen, A. & Fitoussi, J. (2009). *Mengukur Kesejahteraan*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Takwin, B. Et.al. (2017). *Laporan Mendeteksi Ketimpangan Sosial Melalui Penilaian Warga: Pengukuran Ketimpangan Sosial 2016*. Jakarta: INFID.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta
- United Nations. (2015). *Concepts of Inequality. UN : Development Issues No. 1*

- Venables & Kanbur (2005). *Spatial Inequality and Development Overview*. UNU-WIDER Project
- Yusuf, Arief Anshory, Andy Sumner, dan Irlan Adiyatma Rum (2013). *Twenty Years of Expenditure Inequality in Indonesia, 1993-2013. Working Paper in Economic and Development Studies No. 201314*. Bandung: Departmen of Economics Padjadjaran University.